

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang:

Pemeriksaan keuangan negara merupakan sebuah hal yang esensial dimana dari pemeriksaan keuangan negara ini kita dapat melihat bagaimana sebuah negara melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangannya secara tepat sasaran dan diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum. Mengingat hal ini adalah hal yang sangat diperlukan karena merupakan sebuah bentuk tanggung jawab dan melihat sejauh mana transparansi serta bentuk pertanggung jawaban yang diberikan pemerintah kepada masyarakatnya. Didalam Undang-Undang UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara jelas bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan sebuah esensial yang wajib dilakukan bagi sebuah negara yang menganut paham demokrasi. Dalam pemeriksaan keuangan negara Indonesia dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan pada akhirnya hasil pemeriksaan BPK RI ini nanti akan dipertanggung jawabkan kepada DPR, DPRD, dan DPD.

BPK RI merupakan sebuah lembaga yang bebas dan mandiri sebagaimana diatur didalam Pasal 23 E, 23 F dan 23 G Amandemen ketiga Undang Undang Dasar 1945. Dalam sistem ketatanegaraan BPK sejajar dengan Presiden, DPR, MA, MK, BPK dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi nilai-nilai professional, independent, dan integritas dalam rangka menghasilkan sebuah kualitas audit yang baik. Pengelolaan keuangan negara meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, termasuk kebijakan serta aktifitas dalam bidang fiskal, moneter serta pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, ataupun berbentuk benda yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. BPK RI mempunyai tiga pemeriksaan meliputi audit keuangan, audit kinerja serta audit dengan tujuan tertentu atau diketahui dengan istilah Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Semakin majunya perkembangan teknologi ini membuat sistem audit juga semakin maju terbukti dengan adanya konsep *continuous auditing* (CA) yang

merupakan sebuah sistem terapan baru yang muncul sebagai sebuah kemajuan dari sebelumnya yang menggunakan *traditional auditing*. Dimana perbedaan yang sangat terlihat adalah dalam CA didalam cara kerjanya sudah menggunakan penerapan teknologi informasi untuk memudahkan kerja auditor, sementara untuk *traditional auditing* masih menerapkan sistem kerja secara manual atau langsung. Penerapan CA di BPK RI juga sudah dilakukan dimana BPK RI berusaha untuk mengadopsi penerapan sistem informasi didalam upayanya untuk selalu mempertahankan kualitas audit yang diberikan dan juga upaya untuk selalu meningkatkan kualitas audit yang diberikan dengan mengadopsi penerapan *E-Audit* untuk semakin memperkuat pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK RI. Sistem ini dikenal dengan istilah BPK Sinergi dimana cara kerja sistem ini adalah BPK dalam melaksanakan pemeriksaannya tidak lagi harus datang ke objek auditnya namun BPK sudah bisa melaksanakan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan serta monitoring informasi yang bersumber dari bermacam pihak, dalam rangka melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara.

Cara kerja dari sistem ini adalah *database* yang sudah dikumpulkan, selanjutnya menyatukan dan membandingkan data dan informasi yang didapatkan dari entitas yang akan diperiksa. Dengan adanya sistem ini semakin memudahkan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan, kemudian proses pemeriksaan yang dilakukan BPK semakin lebih cepat dimana kita tentu mengetahui dalam melaksanakan pemeriksaan BPK hanya diberikan waktu dua bulan saja untuk keseluruhan entitas yang menjadi tanggung jawabnya (Citra, 2009).

Dengan hadirnya *e-audit* ini semakin memudahkan laju pengerjaan pemeriksaan lebih cepat karena dengan mekanisme *e-audit* ini auditor dan entitas dapat dengan cepat melakukan pengecekan maupun otorisasi data. Saat ini digitalisasi sangat bermanfaat untuk diterapkan diberbagai lini ataupun juga berbagai bidang, mengingat saat ini sedang terjadi peristiwa yang sangat luar biasa dan tidak pernah diduga sebelumnya bahwa akan terjadi peristiwa sebesar ini yaitu “*Pandemic Covid 19*“. Situasi ini dialami oleh seluruh negara tidak terkecuali di Indonesia, adanya *pandemic* ini sangat berdampak sekali dalam berbagai bidang yang ada di Indonesia baik itu sektor pemerintah, swasta, dan tentunya masyarakat umum. Tak terkecuali pada bidang audit sangat terpengaruh dengan adanya

pandemic seperti ini, karena mengakibatkan adanya hambatan dalam proses audit terutama dalam hal melaksanakan proses audit lapangan. Dengan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maka dampaknya sangat dirasakan oleh auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit lapangan.

Dengan adanya peristiwa *pandemic* ini mengembalikan sebuah sistem lama yang sebetulnya sudah lama diusulkan bahkan sudah dibentuk fungsi serta tujuannya yang juga dijadikan sebagai sebuah pergantian metode melalui *remote-auditing*. Hadirnya sistem ini auditor dapat melaksanakan sebagian atau bahkan keseluruhan prosedur auditnya secara jarak jauh (*remote*). Selaras dengan yang peneliti sampaikan sebelumnya bahwa *remote-auditing* ini bukanlah sebuah “barang” yang baru bagi seorang auditor internal (Rujia, Zhiya & Zhenkai, 2019). Dengan adanya revolusi industri ini dan perkembangan teknologi yang berkembang begitu pesat pada dasarnya menekankan atau disarankan auditor untuk tidak membawa “tangan kosong” pada waktu mendatangi tempat klien dalam melaksanakan audit. Hal ini dikarenakan seharusnya auditor bisa mendapatkan data perusahaan atau bisa mengakses perusahaan dengan sebuah persetujuan antara auditor itu dengan pihak terkait. Apalagi jika perusahaan tersebut telah menggunakan aplikasi *Enterprise Resource Planning* (ERP) yang mana hampir semua data sudah bisa dimasukkan kedalam sistem dan akan berbentuk digital serta akan bisa berintegrasi dengan sistem. Maka, jika sudah seperti ini seharusnya auditor dapat melakukan audit atau revidi dokumen dan juga revidi analitis di kantor mereka, sebelum melakukan kunjungan kepada klien. Apabila ini sudah diterapkan tentunya akan meringankan tugas auditor dan lebih fokus melaksanakan prosedur-prosedur lainnya seperti wawancara pelaku proses serta observasi pelaksanaan proses di lapangan (Ariston & Handoko, 2006).

Pada dasarnya sistem ini tentu tidak jauh berbeda dengan sistem audit yang dilakukan pada umumnya, hanya saja dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat hingga saat ini juga menekan dunia audit untuk juga melakukan adaptasi terhadap teknologi yang akan digunakan nantinya untuk membantu proses audit. Hal ini dikarenakan jika kita melihat dari prosesnya tentu akan melibatkan teknik audit sebagai berikut: transaksi dipilih, hasil yang diharapkan dihitung, transaksi diproses oleh aplikasi, aktual dan hasil yang diharapkan dibandingkan, dan setiap

pengecualian dicatat. Langkah umum tersebut sama digunakan untuk kedua teknik audit (Koch, 1984).

Seperti yang sudah peneliti sampaikan pada paragraf sebelumnya RDA adalah sebuah sistem dimana tujuan adanya aplikasi ini untuk meminimalisir atau mengatasi masalah integritas yang akan memengaruhi sebuah sistem, terutama didalam basis penyimpanan. RDA akan memiliki banyak sekali keunggulan didalam penyimpanan data karena akan berfungsi sebagai validasi bukti data dengan aman, sering dan efisien apalagi jika sering untuk melakukan pembaharuan maka proteksi data akan lebih sangat efisien dan efektif (Sookhak, Gani, Khan & Buyya, 2017). Kita tahu bahwa biasanya untuk membuktikan ataupun dalam melaksanakan proses audit tidak bisa lepas dengan pelaksanaan audit lapangan. Hal ini dikarenakan auditor juga perlu melaksanakan pengecekan ataupun juga memastikan bagaimana situasi dilingkungan tersebut atau di lapangan secara aslinya. Tujuan dari adanya sistem audit lapangan ini untuk memperoleh kepercayaan secara sistematis dengan mengumpulkan fakta secara objektif tentang operasi entitas, mengevaluasinya, serta (1) memandang apakah pembedahan tersebut memenuhi standar yang bisa diterima serta menggapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan; dan (2) memberikan informasi untuk pengambilan keputusan oleh manajemen (3) mengenali metode untuk mengurangi biaya pengambilan sampel (Claycomb, 2000).

Maka untuk tetap memastikan bahwa audit lapangan bisa tetap berjalan saat ini disampaikan di (DDTC,2020) BPK RI menggunakan berbagai macam teknologi penunjang dalam melaksanakan audit lapangan. Yaitu menggunakan *platform* media tatap muka secara jauh atau daring seperti menggunakan *Zoom meeting*, *Google meeting* dan berbagai aplikasi atau media lainnya. Hal itu sudah disampaikan oleh pimpinan BPK RI Agung Firman Sampurna berkata bahwa BPK mengetahui bahwa *pandemic Covid-19* memiliki dampak yang cukup banyak dalam pemeriksaan terutama dalam proses audit lapangan, baik yang dialami pemerintah maupun auditor yang ada di BPK. Beliau menyampaikan, BPK saat ini memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara penuh dalam melaksanakan kerja audit ditengah adanya *pandemic* ini. Dimana BPK saat ini berkomitmen untuk bisa menyelesaikan tugas *mandatorynya* sesuai tepat waktu yang telah ditentukan

menggunakan pemanfaatan teknologi. Harapannya adalah ini dapat menjadi sistem kerja baru dan memakai langkah-langkah pengujian alternatif.

Agung pula merasa puas dan takjub terhadap apa yang dilakukan tim pemeriksaan BPK yang senantiasa melakukan tugas mengenakan dua metode sekaligus. Pertama, metode yang dilakukan yaitu pendekatan alternatif berbasis teknologi informasi. Kedua, melaksanakan mendatangi langsung ke lapangan. menurutnya, pengujian ke lapangan tetap dibutuhkan dalam memperoleh fakta yang bisa memberikan kepercayaan yang mencukupi (*reasonable assurance*). Oleh karena itu kualitas pemeriksaan tidak menurun meski di tengah masa pandemi. Memang dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2019 mempunyai rintangan tertentu. Penyebabnya adalah pandemic *Covid 19* dimana pengerjaan pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan dilakukan secara WFH.

Keberhasilan penerapan sistem RDA ini tidak hanya ditemukan di Indonesia saja namun di Amerika Serikat (AS) ada sebuah penelitian yang mana membahas bagaimana penerapan teknologi *Microscale-audit of Pedestrian Streetscapes* (MAPS) yang dibandingkan dengan data yang sesungguhnya dimana yang menjadi objeknya adalah luas lahan mereka menemukan bahwa hasil yang ditemukan antara perbandingan dalam mengukur sistem MAPS yang dibandingkan dengan observasi lapangan secara langsung menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dimana penerapan *online auditing* ini memberikan dampak berupa lebih murah, lebih efisien waktu dan lebih aman dibandingkan dengan observasi lapangan (Kurka, Adams, Geremia, Zhu, Cain, Conway dan Sallis (2016). Tentu dalam pelaksanaannya juga BPK tetap mempertahankan standarnya dimana setiap sistem yang diterapkan tentu harus berlandaskan demi kepentingan hasil kualitas audit yang bagus serta terpercaya. Kualitas audit definisinya menurut Zahmatkesh dan Rezazadeh (2017) mengatakan kalau kualitas audit merupakan sebuah hasil kerja auditor yang ditampilkan dengan laporan audit yang andal berlandaskan peraturan yang ditetapkan. Hasil yang andal dan kesesuaiannya dengan standar ini akan menjadi bukti bahwa sejauh mana hasil kerja auditor tersebut terhadap hasil audit yang ia terbitkan apakah hasil audit tersebut sudah bagus atau belum yang nanti juga akan dipengaruhi oleh kelengkapan dokumen-dokumen yang diauditnya.

Alfareza Desta Prasetyo Adi Zainudin, 2021

Kualitas Audit Di Pemerintah Indonesia: Suatu Telaah Faktor Potensial

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, S1 Akuntansi

(www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id)

Konsep penelitian RDA ini pada dasarnya sudah lama ditetapkan dan memang difungsikan akan sebagai pendamping dari audit lapangan yang mana nantinya RDA ini akan digunakan apabila cakupan wilayah ataupun objek audit lapangannya ini akan sulit untuk dicapai. Berhubung saat ini sedang dalam masa *pandemic* dan akses kemanapun terbatas maka RDA digunakan sebagai alat untuk melaksanakan audit lapangan secara *virtual*, tentunya penerapan RDA ini perlu juga didukung oleh beberapa penilaian agar nantinya penerapan RDA ini tentu tidak akan jauh berbeda secara fakta dan akurasi data yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Serta satu hal yang pasti adalah tetap mengedepankan hasil kualitas audit yang semakin baik lagi kedepannya. Selain itu juga dalam sistem ini dapat memberikan sebuah pengawasan kepada para auditornya dimana BPK bisa mengetahui lokasi para auditor dengan pengawasan atau monitoring yang dapat dilakukan dengan sistem *e-audit* BPK RI ini.

Maka tentunya **skeptisme auditor** diperlukan dalam pelaksanaannya serta didalam proses audit. Skeptisme, berasal dari kata skeptis, didalam KBBI mengatakan bahwa paham yang memandang suatu fenomena ataupun peristiwa dianggapnya selalu mencurigakan ataupun meragukan, pandangan yang diberikan dalam audit ini tentu menyangkut pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan audit yang dilakukan oleh seorang auditor tersebut. Tentunya dalam hal audit skeptisme sudah pasti sangat dibutuhkan oleh seorang auditor hal ini dikarenakan jika keputusannya tidak sesuai maka akan memengaruhi hasil auditnya, maka dari itu sudah pasti pengukuran dan penentuan skeptisme seorang auditor tidak hanya diperlukan keputusan yang sudah ditetapkan akan tetapi perlu dipertimbangan secara matang-matang dalam pengambilan keputusannya. Menurut (Hurtt, 2010) mengatakan dalam penelitiannya bahwa yang menjadi pusat perhatian dalam menentukan skeptisme erat kaitannya dengan mempelajari pengumpulan bukti penting yang menjadi pusat skeptisme auditor karena merupakan sebuah proses yang tidak sederhana hingga penilaian sampai bukti yang cukup dan kompeten tersebut diperoleh (Rasso, 2015).

Untuk mengatasinya tentu seorang auditor tentu perlu mempunyai landasan dalam menentukan skeptisme yang dimilikinya, dalam hal ini seorang auditor akan menggunakan pengetahuan yang dimilikinya, kemampuan serta kapabilitas yang

dimilikinya sebelum mengambil keputusan yang akan diambil karena hal ini merupakan tuntutan yang dimilikinya sebagai seorang auditor yang mana dalam menjalankan profesinya harus cermat serta teliti dalam berbagai macam hal terutama yang berkaitan dengan auditnya seperti pengumpulan bukti sampai dengan penilaian bukti audit serta temuan-temuannya yang harus didukung oleh sikap integritas yang dimilikinya (Jaya, Irene & Chairul, 2016).

Selain skeptisme auditor dalam hal ini peneliti juga mempertimbangkan faktor **kompetensi auditor** yang wajib dimiliki seorang auditor untuk melaksanakan tugas auditnya. Tentu karena seorang auditor merupakan sebuah profesi yang sangat profesional dan dengan dinamika dunia audit yang kian hari banyak sekali fenomena-fenomena baru serta perkembangan dunia audit yang diiringi dengan meningkatnya teknologi tentu hal itu perlu diimbangi dengan kompetensi yang harus dipunyai oleh seorang auditor. Kompetensi auditor, menurut Ramlah, Syah dan Dara (2018) menyatakan bahwa seseorang yang kompeten merupakan seseorang yang memiliki keterampilan untuk melakukan tugasnya dengan mudah, cepat, intuitif dan jarang sekali melakukan kesalahan. Kompetensi dalam hal ini memiliki komponen Pendidikan dan pengalaman, kompetensi tidak hanya mengacu kepada berapa lama pengalaman pemeriksaan mengingat hal tersebut tidak bisa dinyatakan

Hal ini semua diperlukan oleh seorang auditor mengingat pekerjaannya akan selalu memiliki banyak sekali ilmu yang digunakan dalam melaksanakan tugasnya, belum lagi dengan tentunya prosedur audit yang dijalankan antar instansi yang akan diaudit pun berbeda dan tentunya tidak hanya satu atau dua instansi saja yang diaudit namun tentunya akan lebih dari itu. Maka sudah sepatutnya kompetensi tersebut harus selalu dijaga agar ilmu serta pengetahuan yang dimiliki auditor kian hari akan kian bertambah dan tetap terjaga seperti halnya kasus-kasus baru serta pengukuran-pengukuran baru yang ditetapkan melalui peraturan-peraturan baru dalam dunia audit yang tetap menjunjung tinggi peningkatan kualitas audit (Tjun, Marpaung & Setiawan, 2012).

Selanjutnya yang diperlukan adalah **Pemahaman Sistem Informasi (PSI)**. PSI menurut Setyorini, (2014) mengatakan bahwa PSI merupakan tolak ukur sejauh mana sistem informasi tersebut terintegrasi terhadap sistem-sistem yang memiliki

hubungan dengan auditor baik yang dimiliki oleh organisasi maupun individu. Seperti halnya kita ketahui dalam dunia saat ini seperti yang peneliti sudah sampaikan diawal tadi bahwa kita saat ini memasuki era digitalisasi yang mana hampir seluruh keperluan baik itu keperluan untuk kehidupan sehari-hari maupun pemenuhan kebutuhan lainnya termasuk dunia kerja saat ini sudah memasuki era digital yang juga terjadi di dunia audit.

Dengan adanya penerapan sistem baru ini harapannya akan menjadi sebuah salah satu sebuah harapan baru atau sebuah peningkatan yang mampu meningkatkan kualitas audit dimana ini merupakan salah satu bentuk digitalisasi dalam dunia audit, tentunya tidak sembarang orang yang bisa dan mengolah sistem ini dan menggunakannya untuk keperluan-keperluan diluar konteks ataupun fungsi yang sudah ada dalam penerapan sistem ini. Dengan adanya sistem ini tentu alasan kenapa sistem ini hadir tentunya demi meningkatkan efisiensi serta efektivitas dari proses audit yang ingin dicapai dan juga bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya dan tentunya untuk peningkatan kualitas audit (Yudha, Sujana & Purnawanti 2017). Untuk menggunakan sistem ini tentunya tidak hanya asal digunakan begitu saja namun perlu adanya sosialisasi serta pembekalan terhadap auditor dalam menggunakan sistem ini terutama setelah mereka sudah menyelesaikan dan telah mendapatkan dokumen-dokumen audit yang diperlukan. Sistem ini juga hadir tentu bukan tanpa tujuan melainkan adanya sistem ini sekali lagi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas baik dari sisi auditor maupun sisi auditee tentunya akan merasakan dampak yang positif dan yang pasti juga tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas audit.

Faktor lain yang memengaruhi kualitas audit adalah **motivasi auditor**. Faktor ini erat kaitannya dengan sebuah dorongan yang memacu ataupun meningkatkan semangatnya untuk meningkatkan kualitas audit (Asmara, 2016). Dalam menciptakan ataupun juga meningkatkan kualitas audit maka faktor ini berperan sangat krusial karena kita bisa menilai jika sebuah sistem ingin ditingkatkan kemampuan serta kualitasnya maka perlu dibutuhkan dorongan dari pihak yang terlibat langsung dalam sistem ataupun program tersebut dalam hal ini adalah auditor dan juga pihak terkait seperti auditee dan pihak-pihak lainnya yang

menggunakan sistem ini. Jika dari seorang auditor itu sendiri tidak memiliki motivasi untuk meningkatkan sistemnya maka sistem itu tentunya tidak akan diperbarui. Kaitan antara motivasi auditor yang memengaruhi kualitas audit ditemukan didalam penelitian Saprudin (2018).

Dalam penelitian ini juga peneliti memasukkan satu variable moderasi yang akan berfungsi sebagai penguat ataupun yang akan melemahkan kompetensi auditor dan motivasi auditor yang dipengaruhi oleh *Time Budget Pressure (TBP)*. Tentunya dalam melaksanakan auditnya auditor menemukan TBP dalam pelaksanaan auditnya, terlebih lagi hal ini juga menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan auditnya karena akan memengaruhi biaya audit dan juga kinerja auditor terutama dalam tuntutan penyelesaian auditnya secara tepat waktu (Setyorini, 2014). Dimana dalam sebuah penelitian ditemukan bahwa ketika TBP tinggi akan memengaruhi kualitas audit serta akan memengaruhi juga secara tidak langsung motivasi auditor serta kompetensi auditor itu sendiri. Karena pada dasarnya TBP itu sendiri merupakan sebuah gambaran normal dimana tekanan yang dihasilkan dari adanya tekanan yang diperoleh dari diperketatnya TBP yang berlangsung secara konsisten dan akan memengaruhi perilaku disfungsional (sikap auditor yang bisa menurunkan kualitas audit), arti pernyataan ini adalah TBP merupakan sebuah situasi yang menekankan auditor dalam menciptakan efisiensi terhadap TBP yang sudah dibuat atau sudah memiliki batasan waktu yang telah ditentukan secara ketat dan mengikat (Yuliyanti & Hanifah, 2018).

Dari kelima pernyataan yang peneliti sampaikan dari skeptisme auditor, kompetensi auditor, pemahaman atas sistem informasi, dan motivasi auditor tersebut menjadi pertimbangan peneliti dalam menjadikan kelima acuan tersebut menjadi variabel independen yang akan digunakan dalam penelitian kali ini. Tidak hanya variabel independen saja namun peneliti juga menambahkan satu variabel moderasi yaitu TBP dalam penelitian ini yang nantinya dapat menguatkan ataupun melemahkan variabel yang akan dipengaruhinya nanti.

Peneliti mengangkat topik ini dikarenakan dengan situasi seperti saat ini maka pastinya pelaksanaan audit menjadi terkendala, tetapi para auditor memiliki siasat untuk mengatasinya dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang berbasis pertemuan ataupun pemantauan secara *virtual* (daring) atau menerapkan sistem

audit jarak jauh. Walaupun metode yang digunakan berbeda namun tidak mengesampingkan bahwa kualitas audit harus tetap dikedepankan, dan yang pasti dengan adanya penerapan metode baru ini akan bekerja secara berdampingan dengan metode yang biasa digunakan demi mencapai sebuah kualitas audit yang bagus walaupun saat ini sedang berada di masa pandemic. Terbukti bahwa keberhasilan dengan adaptasi sistem baru ini bukannya menjadi hambatan bagi auditor namun auditor memiliki kreativitas serta cara-cara baru dalam menyiasati situasi seperti ini, maka hal ini menjadi positif dimana keberhasilan seorang auditor menyiasati situasi ini tidak menghalanginya dalam situasi apapun untuk melaksanakan audit yang merupakan tugas utama dari seorang auditor. Situasi ini seharusnya menjadi sebuah semangat baru bagi seorang auditor mengingat beberapa waktu lalu masih terdapat faktor-faktor yang belum menunjukkan kepuasan terhadap audit yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kualitas sumber daya auditor internal pemerintah yang masih di bawah standar pelayanan terendah sebagai lembaga publik, kurangnya aparatur yang tersedia dan kompetensi yang rendah, serta anggaran yang terbatas (Akbar, Aswar & Lastiningsih, 2020). Maka harapannya dengan adanya penelitian ini yang mengusung penerapan sistem baru pemeriksaan ini diharapkan mampu menjadikan masukan kepada pihak terkait yang juga menggunakan metode ini dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit dan juga kompetensi yang dimiliki oleh auditor dan mampu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas audit lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka disimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah skeptisme auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah kompetensi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah pemahaman sistem informasi memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
4. Apakah motivasi auditor memiliki pengaruh terhadap kualitas audit?
5. Apakah *Time budget Pressure* memoderasi hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit?

6. Apakah *Time budget Pressure* memoderasi hubungan antara motivasi auditor terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pertanyaan yang telah peneliti buat maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji hubungan antara skeptisme auditor terhadap kualitas audit.
2. Menguji hubungan antara kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
3. Menguji hubungan antara pemahaman atas informasi terhadap kualitas audit.
4. Menguji hubungan motivasi auditor terhadap kualitas audit.
5. Menguji kaitan yang akan diberikan oleh TBP kepada kompetensi auditor terhadap kualitas audit.
6. Menguji kaitan yang akan diberikan oleh TBP kepada motivasi auditor terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan kali ini diharapkan memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, baik itu pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih jauh terkait bagaimana masyarakat secara umum mampu memahami bagaimana proses pelaksanaan audit dimasa *pandemic* seperti ini serta bagaimana implementasinya atau cara-cara yang dilakukan oleh auditor untuk menjalankan proses audit serta prosedur auditnya dimasa *pandemic* seperti ini serta apa saja kendala yang akan dialami oleh auditor. Selain itu juga dalam penelitian ini diharapkan kedepannya mampu memberikan wawasan tentang penerapan RDA didalam proses audit.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Auditor (BPK RI)

Memberikan pandangan dari sudut pandang peneliti terkait bagaimana seharusnya auditor melaksanakan proses auditnya selama *pandemic* ini yang mana akan ada perbedaan dalam prosedur audit yang biasa dilakukan dengan yang sudah

Alfareza Desta Prasetyo Adi Zainudin, 2021

Kualitas Audit Di Pemerintah Indonesia: Suatu Telaah Faktor Potensial

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, S1 Akuntansi

(www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id)

biasa dilakukan oleh auditor. Tentu perbedaan ini akan menjadi fokus utama bagi auditor karena akan mengganti metodenya dengan metode yang baru dimana tentunya mereka juga perlu beradaptasi dengan penerapan metode ini, tidak hanya dari auditor saja klien pun ataupun instansi yang menjadi tanggung jawabnya auditor perlu beradaptasi dengan prosedur yang nantinya akan diterapkan oleh auditor dalam melaksanakan prosedur auditnya. Serta memberikan pemahaman tentang dampak yang diberikan oleh sistem ini seperti pemeriksaan akan menjadi lebih efektif, cakupan pemeriksaan akan semakin luas, kemudian biaya pemeriksaan juga akan menjadi lebih hemat, serta proses dan penyelesaian audit pun akan lebih cepat.

b. Bagi Auditee

Memberikan pemahaman kepada auditee tentang dampak yang akan dihasilkan dengan adanya sistem ini, yang mana sebagai auditee nantinya mereka akan dimudahkan dengan mendapatkan keuntungan diantaranya: mereka akan dapat lebih menghemat waktu untuk dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang akan diperiksa terutama dalam dokumen pertanggungjawaban keuangan yang dibutuhkan oleh pemeriksa serta dapat mendeteksi lebih cepat apabila ada kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat terdeteksi dengan sistem RDA ini.